

SKRIPSI

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN
TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LUWU**

Oleh

KHUSNUL HATIMAH

105730464814



Pogram Studi Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASAR

MAKASSAR

2018

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN
TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LUWU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar
sarjana pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

KHUSNUL HATIMAH

105730464814

**Pogram Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

TUHAN YANG MAHA ESA

karena hanya atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.

Bapak dan Ibuku Tercinta

Terima kasih karena telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Sayapun menyadari bahwa kata terima kasih saja tidak cukup dibandingkan pengorbanan yang dengan ikhlas telah mereka berikan.

MOTTO HIDUP

Perjuangan seseorang akan banyak berarti jika dimulai dari diri sendiri dan dilandaskan dengan keikhlasan



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu"

Nama Mahasiswa : Khusnul Hatimah

No. Stambuk/NIM : 105730464814

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan di ujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.Ak.CA.CPA
NBM: 116 5156

Pembimbing II,

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ismail Rasulong, S.E.,M.M.
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,

Ismail Badollahi, S.E.M.Si,Ak.,CA.CSP
NBM: 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama KHUSNUL HATIMAH, NIM 105730464814, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/2018 M, tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Dzulhijjah 1439 H
Makassar,
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

- 1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM 
(Rektor Unismuh Makassar)
- 2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM 
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
- 3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM 
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
- 4. Penguji : 1. Dr. Muryani Arsal, SE., MM., Ak., CA 
2. Ismail Rasulong, SE., MM 
3. Abd. Salam HB, SE., M.Si., Ak., CA 
4. Sitti Zulaeha, S.Pd., M.Si 

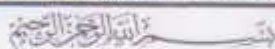
Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khusnul Hatimah
Stambuk : 105730464814
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di dopan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 4 September 2018

Yang membuat pernyataan,


Khusnul Hatimah

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi,



Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903 078



Ismail Badolahi, S.E., M.Si, Ak., Ca
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Sabri dan ibu Masita yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudariku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasullong, SE.,MM, Dekan fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.S.I.,Ak, selaku ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Andi Rustam,SE.,MM.Ak.CA.CPA, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terimah kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat , kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universtas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 25 Mei 2018

Khusnul Hatimah

ABSTRAK

KHUSNUL HATIMAH, Tahun 2018. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu periode 2008-2017. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.Ak.CA.CPA dan Pembimbing II Ismail Rasulong, SE.,MM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Luwu tahun 2008 sampai dengan tahun 2017. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yaitu memilih neraca, laporan realisasi anggaran Kabupaten Luwu dan temuan audit yang didapatkan dari ikhtisar pemeriksaan semester I dan II tahun 2008-2017 pada website Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu <http://www.bpk.go.id>.

Berdasarkan hasil olah statistik SPSS dengan regresi linear berganda dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa variabel tingkat kekayaan daerah berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan ukuran daerah, tingkat ketergantungan pada pusat dan temuan audit tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, untuk variabel ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pada pusat tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Sedangkan Temuan Audit BPK sesuai dengan hipotesis penelitian.

Kata Kunci: Kinerja Pemerintah, Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat dan temuan audit.

ABSTRACT

Khusnul HATIMAH, Year 2018. Influence of Characteristics of Local Government and Audit Findings on Performance P he Government of Luwu regency period 2008-2017. Thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Dr. H. Andi Rustam, SE., MM.Ak.CA.CPA and Advisor II Ismail Rasulong, SE., MM .

This study aims to determine the influence of local government characteristics and BPK audit findings on the performance of local governments Luwu District in 2008 until 2017 . The data collection is done by documentation technique and literature study. Technique of sampling with purposive sampling method that is choosing balance sheet, report of budget realization of Luwu Regency and audit findings obtained from summary of examination semester I and II year 2008-2017 at website of Supreme Audit Board (BPK) that is [http://www.bpk.go .id](http://www.bpk.go.id).

Based on the result if statistic SPSS with multiple linear regression can be concluded as follows that variable of level of local wealth have significant effect to local government performance. While the size of the region, the level of dependence on the center and audit findings do not affect the performance of local governments, but for variable size of the region and the level of dependence on the center is not in accordance with the research hypothesis.

Keywords: Government Performance, Regional Size, Local Wealth Level, Level of Dependency at Center and audit findings .

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Karakteristik Pemerintah Daerah	6
1. Ukuran Daerah	7
2. Tingkat Kekayaan Daerah	8
3. Tingkat Ketergantungan Pada Pusat	9
B. Temuan Audit BPK	10
C. Kinerja Pemerintah Daerah	11
D. Penelitian Terdahulu	14
E. Kerangka fikir	21
F. Hipotesis	21
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Definisi Operasional Variabel	24
D. Populasi dan Sampel	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	26
BAB V	
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kabupaten Luwu	30
B. Visi dan Misi	30
C. Struktur Organisasi	32
D. Tugas Dan Fungsi	33
BAB V	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	55
B. Pembahasan	55
BAB VI	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1	Kriteria Penilaian Kinerja	24
Tabel 5.1	Analisis Total Aset.....	45
Tabel 5.2	Hasil Ukuran Daerah.....	46
Tabel 5.3	Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah	47
Tabel 5.4	Analisis Total Pendapatan.....	48
Tabel 5.5	Tingkat Kekayaan Daerah.....	49
Tabel 5.6	Analisis Realisasi Dana Alokasi Umum	50
Tabel 5.7	Tingkat Ketergantungan Pada Pusat.....	51
Tabel 5.8	Data Temuan Audit	52
Tabel 5.9	Kinerja Pemerintah Daerah	54
Tabel 5.10	Hasil Uji Multikolinearitas	56
Tabel 5.11	Hasil Uji Autokorelasi	57
Tabel 5.12	Hasil Uji Kelayakan Regresi	58
Tabel 5.13	Hasil Analisis Regresi Berganda	59
Tabel 5.14	Hasil Uji Koefisien Determinasi	61

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	19
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kantor BPKD	32
Gambar 5.1	Hasil Uji Normalitas Data	55
Gambar 5.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 2001 mengalihkan berbagai macam kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah (pemda). Undang-Undang No.32 Tahun 2004 (UU No. 32/2004) tentang pemerintah daerah menegaskan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Luwu diharapkan dapat lebih memahami kondisi dan permasalahan daerahnya secara menyeluruh. Pemerintah daerah Kabupaten Luwu juga dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, pembangunan dan pelayanan akan berjalan dengan baik dan merata. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Luwu dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional semakin besar dan dibutuhkan adanya sistem pengendalian, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai Pemerintah Daerah. Hal tersebut meliputi tuntutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk membuat laporan keuangan yang bersifat transparan dan akuntabel agar tercapai kinerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Luwu dalam melayani masyarakat melakukan pengelolaan atas keuangan daerah. Dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD) suatu pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan (fraud). Dalam mendukung pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menyusun anggaran keuangan yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Anggaran dalam Pemerintahan daerah dapat disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa yang mungkin akan terjadi pada tahun anggaran yang berkenan. APBD terdiri dari Pendapatan Asli daerah (PAD), belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang "Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara" menyebutkan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat berupa temuan audit, opini audit maupun kesimpulan audit. Sementara itu, salah satu pengukuran pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan salah satu Laporan Hasil Pemeriksaan badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengungkapkan temuan audit BPK atas ketidak patuhan Pemda terhadap peraturan perundang-undangan. Semakin banyak temuan audit menunjukkan bahwa pengelolaan

keuangan dari Pemda kurang baik yang ada pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja pemda tersebut.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) serta sudarsana (2013) menyatakan bahwa isi dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD) Pemda Kabupaten/Kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggungjawab dan karakteristik dari Pemerintah Daerah. Kinerja Pemda dipengaruhi oleh ukuran daerah ditemukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012). Hal ini berbeda dengan Sudarsana (2013) yang menyatakan bahwa ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel variabel yang ada pada penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012) serta Sudarsana (2013). Variabel variabel yang digunakan diantaranya ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat dan Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini dilakukan kembali karena masih terdapat perbedaan hasil pada penelitian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Di Kabupaten Luwu pengelolaan keuangan daerahnya belum akuntabel dikarenakan pelayanan publik kurang baik. ini dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Hal ini berkaitan temuan audit BPK dengan melakukan pemeriksaan badan pengelolaan keuangan daerah dimana Semakin banyak temuan audit menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari Pemerintah daerah kurang baik yang ada pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja pemda tersebut.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah**

Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai latar belakang masalah diatas, maka penulis melakukan permasalahan yaitu:

1. Apakah Ukuran Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu?
2. Apakah Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu?
3. Apakah Tingkat Ketergantungan Pada Pusat berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu?
4. Apakah Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
4. Untuk mengetahui pengaruh temuan audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Luwu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Pemerintah Daerah

Suhardjanto dan Yulianingtyas (2010) mendefinisikan Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2010) menggunakan ukuran (*size*), jumlah SKPD, dan status daerah sebagai proksi dari karakteristik pemerintah daerah.

Menurut Mustikarini dan Fitriyasi (2012), Karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan proksi total aset, porsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, porsi dana alokasi umum terhadap total pendapatan, total belanja daerah, jumlah anggota legislatif. Semakin besar aset pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan banyaknya jumlah anggota legislatif seharusnya diharapkan akan semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kinerja yang baik dari pemerintah daerah tersebut kepada masyarakat.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penelitian ini menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, tingkat kekayaan daerah yang diproksikan dengan total aset, tingkat kekayaan daerah yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat ketergantungan kepada pemerintah Pusat yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU).

1. Ukuran Daerah

Ukuran adalah suatu tolak ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar, sedang, atau kecil suatu objek tertentu. Jika objek tertentu dikaitkan dengan instansi atau organisasi ukuran dapat dilihat secara langsung (fisik) maupun tidak langsung. Tetapi pengukuran suatu organisasi atau instansi tidak harus berdasarkan pada fisiknya saja, seperti besar dan luas kantor instansi tersebut karena tidak ada tolak ukur yang pasti tentang hal tersebut (Rachmawati, 2016).

Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012).

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan. Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kinerjanya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat *good news*. Good news tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut sehingga meningkatkan skor kinerjanya. Ukuran pemerintah daerah diukur dengan *log natural* (\ln) total aktiva pemda. Berdasarkan pembahasan mengenai ukuran daerah maka dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Daerah} = \text{Ln Total Aset}$$

2. Tingkat Kekayaan Daerah

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan asli daerah yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program program pembangunan.

Kemakmuran adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kemakmuran suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda (Kusumawardani, 2012).

Adapun pertimbangan tingkat kekayaan diukur dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal

dari pengelolaan sumber daya pada daerah tersebut. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Florida, 2007 dalam Nugroho, 2012). Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi akan meningkatkan PAD pemerintah daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Halim dan Kusufi, 2012:101).

Uraian di atas didukung oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012), Wenny (2012), serta Sudarsana (2013) yang menemukan bahwa tingkat kekayaan daerah yang diukur dengan PAD berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda. Julitawati et al. (2012) juga menemukan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota. Maka pada penelitian ini variabel tingkat kekayaan diukur dengan rumus :

$$\text{Tingkat kekayaan daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total pendapatan}}$$

3. Tingkat Ketergantungan Pada Pusat

Pada penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012), tingkat ketergantungan dengan pusat dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut peraturan perundang-undangan No. 5 tahun 2005, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) di tetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan penerimaan umum lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Hal ini memotivasi pemda untuk memiliki kinerja yang lebih baik karena pengawasan dari pemerintah Pusat lebih besar. Dengan demikian semakin tinggi DAU dari pemerintah pusat maka diharapkan semakin baik pula pelayanan yang diberikan Pemda (*agent*) kepada masyarakat (*principal*), sehingga kinerja pemerintah daerah juga semakin meningkat. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Mustikarini (2012) yang menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Berdasarkan pembahasan diatas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{tingkat ketergantungan dengan pusat} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total pendapatan}}$$

B. Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ditetapkan (Pramono, 2008). Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang “Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara” menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar

pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan kasus kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk mengetahui temuan audit suatu daerah dapat dilakukan dengan memberikan opini atas temuan audit, jika Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*) diberi skor 0 (nol), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberi skor 1 (satu), dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi skor 2 (dua).

Temuan audit yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Hilmi (2010) yaitu dengan menggunakan jumlah temuan audit pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai proksi dalam mengukur temuan audit.

C. Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Robbin (2008:92), Kinerja adalah ukuran hasil kerja yang dilakukan dengan menggunakan kriteria yang disetujui bersama. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus

menerus dan pelaporan capaian, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan.

Mardiasmo (2009:121) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan eektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian Pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sector public dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja dalam suatu organisasi merupakan komponen penting yang dapat memberikan motivasi dan arah serta umpan balik perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rasio efisiensi. Nordiawan dan Hertianti (2010:161) mendefinisikan efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan. Semakin kecil rasio, maka semakin baik tingkat efisiensinya, begitu pula sebaliknya. Semakin besar rasio, maka akan semakin buruk tingkat efisiensinya. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dan penerimaan daerah.

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan karakteristik Pemda sudah banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian tentang pengaruh karakteristik Pemda dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyasi (2012), Ardhani (2011) mengaitkan dengan pengalokasian anggaran belanja modal, Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) mengaitkan dengan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk variabel temuan audit Hilmi dan Martani (2012) menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi, Mustikarini dan Fitriyasi (2012) menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen terhadap kinerja keuangan pemda, Zaelani dan Martani (2011) menggunakan variabel tersebut sebagai variabel dependen yang menjadi proksi dari kelemahan pengendalian internal suatu Pemda. Meskipun beberapa penelitian telah dilakukan, namun masih sedikit penelitian yang menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) untuk membuktikan bahwa karakteristik suatu pemerintah daerah (ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan dan belanja daerah) dan temuan audit BPK memiliki pengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota untuk dengan menggunakan beberapa metode regresi untuk 275 PEMDA untuk tahun 2007. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa semua variabel karakteristik Pemda dan juga temuan audit BPK berpengaruh signifikan terhadap variabel independen dengan arah yang sesuai dengan hipotesis kecuali untuk variabel belanja daerah. Variabel ukuran daerah, kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap

skor kinerja Pemda sedangkan variabel belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda.

Rohman dan Nugroho (2012) meneliti mengenai pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui PAD sebagai variabel intervening, di mana penelitiannya mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Florida (2007) dengan objek penelitiannya adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang berasal dari realisasi Anggaran Laporan Pendapatan dan Belanja (APBN) dari kabupaten kota di Jawa Tengah dari tahun 2008 sampai 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal secara signifikan berpengaruh negatif secara langsung terhadap kinerja keuangan, belanja modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Julitawati (2012) menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini yaitu 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang telah memiliki data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) periode 2009-2011. Penelitian ini menggunakan metode sensus. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah digunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Penelitian Wenny (2012) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan maupun parsial mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2005-2009 yang dipublikasikan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian Kusumawardani (2012) menunjukkan bahwa size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 31,5% dan secara parsial menunjukkan bahwa variabel size dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sedangkan kemakmuran dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian Harumiati dan payamta (2014) membahas bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan Audit BPK terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2011. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa secara rata-rata kinerja penyelenggara pemerintah daerah kabupate/kota di Indonesia masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil olah statistik SPSS dengan regresi

linear dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa tingkat kekayaan daerah (PAD), belanja modal (BM), dan Temuan Audit (TEMUAN) berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi 5% dan hanya berpengaruh pada tingkat signifikansi 10%. Variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (DAU) dan status daerah (STATUS) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah.

Penelitian Kusuma (2017) bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diprosikan dengan ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, *leverage*, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja. Hasil dari Uji R² menunjukkan bahwa variable kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 35,5% dan 64,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Hasil penelitian dari uji t menunjukkan bahwa kemakmuran dan belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

Rustianingsih (2014) melakukan penelitian dengan judul faktor faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah, *leverage* tingkat ketergantungan pada pusat, jumlah penduduk dan hasil audit BPK. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki data lengkap, data berupa LRA, neraca daerah, laporan hasil audit BPK, hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan jumlah

penduduk. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian secara simultan variabel ukuran pemda, PAD, belanja daerah, pinjaman, DAU, jumlah penduduk dan hasil audit BPK berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah karena nilai signifikannya di bawah 0,05. Secara parsial PAD dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

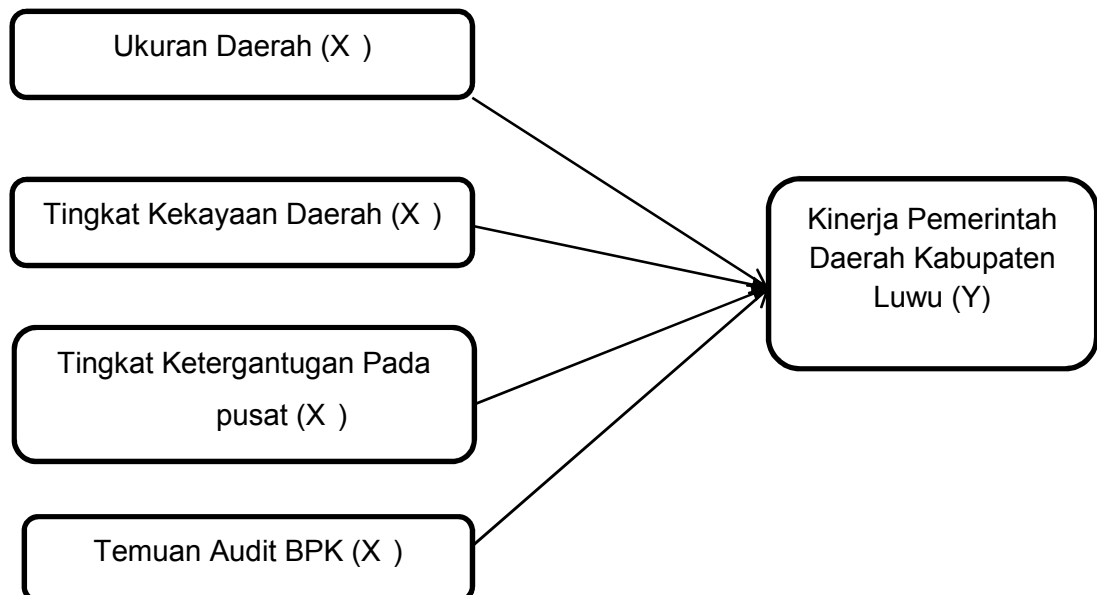
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELTI (TAHUN)	VARIABEL YANG DIGUNAKAN	HASIL PENELITIAN
1.	Mustikarini dan Fitriyasi (2012)	Ukuran daerah, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja daerah dan temuan audit BPK terhadap skor kinerja	semua variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel independen dengan arah yang sesuai dengan hipotesis kecuali untuk variabel belanja daerah
2	Rohman dan Nugroho (2012)	Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui PAD sebagai variabel intervening	belanja modal secara signifikan berpengaruh negatif secara langsung terhadap kinerja keuangan, belanja modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah.
3.	Julitawati, (2012)	Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota
4.	Wenny (2012)	pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak

			dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota
5.	Harumiati dan payamta (2014)	Tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pusat, belanja modal dan temuan Audit terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah	Berdasarkan hasil olah statistik SPSS dengan regresi linear tingkat kekayaan daerah (PAD), belanja modal (BM), dan Temuan Audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah. Variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (DAU) dan status daerah (STATUS) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah.
6.	Kusuma (2017)	Kemakmuran, belanja daerah, ukuran, tingkat ketergantungan pada pusat dan <i>leverage</i> terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Hasil penelitian dari uji t menunjukkan bahwa kemakmuran dan belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.
7.	Rustianingsih (2014)	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah, <i>leverage</i> tingkat ketergantungan pada pusat, jumlah penduduk dan hasil audit BPK	secara simultan variabel ukuran pemda, PAD, belanja daerah, pinjaman, DAU, jumlah penduduk dan hasil audit BPK berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah karena nilai signifikannya di bawah 0,05. Secara parsial PAD dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang meliputi (Ukuran daerah, Tingkat kekayaan daerah, Tingkat ketergantungan pada pusat) dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah di kabupaten Luwu. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir

F. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori diatas, maka dirumuskan dimana hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori

yang relevan, belum didasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiono:2010).

1. Ukuran Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu

Tujuan utama dari program kerja Pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) bahwa ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota di Indonesia. Dari uraian di atas, maka H1 pada penelitian ini adalah:

H1: Di duga ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Luwu.

2. Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pememerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Sumarjo (2010) menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut. Adi (2006) dalam Sumarjo (2010) menyebutkan bahwa peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Dimana kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu Pemda.

Uraian di atas didukung oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang menemukan bahwa pendapatan Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda. Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini adalah:

H2: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda Kabupaten Luwu.

3. Tingkat Ketergantungan Pada Pusat berpengaruh positif terhadap Kinerja Pememerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah. Walaupun penggunaan ditetapkan oleh daerah namun Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Selain itu dengan semakin besarnya penerimaan DAU oleh satu daerah maka Pemerintah akan lebih memantau pelaksanaan dari alokasi DAU dibanding dengan daerah yang lebih sedikit penerimaannya. Hal ini memotivasi Pemda untuk berkinerja lebih baik karena pengawasan dari Pemerintah Pusat lebih besar. Dengan demikian, semakin tinggi DAU dari Pemerintah Pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan Pemda kepada masyarakatnya sehingga kinerja Pemda juga semakin meningkat. Dari uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H3: Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh positif terhadap Kinerja Pememerintah Daerah Kabupaten Luwu.

4. Temuan Audit BPK berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pememerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas

pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi angka temuan audit, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) sendiri yang hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten. Dengan demikian, hipotesis terakhir penelitian ini adalah:

H4: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda Kabupaten Luwu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Eksplanatori. Penelitian eksplanatori bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bupati pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu. waktu penelitian, rencana dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan sekitar bulan April sampai dengan bulan Mei Tahun 2018.

C. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah kinerja Pemerintah daerah. Untuk mengetahui skor kinerja dapat digunakan rumus :

$$Efisiensi\ Kinerja = \frac{Total\ Realisasi\ Belanja}{Total\ Realisasi\ Pendapatan} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah

Prosentase kinerja	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisien
90%-100%	Kurang efisien
80%-90%	Cukup efisien
60%-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat efisien

2. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, dan temuan audit BPK.

a. Variabel Ukuran Daerah

Ukuran adalah suatu tolak ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar, sedang, atau kecil suatu objek tertentu. Penelitian ini ukuran pemerintah daerah dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki.

$$\text{Ukuran daerah} = \ln \text{ Total Aset}$$

b. Variabel Tingkat Kekayaan Daerah

Penelitian ini menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan sebagai proksi pengukuran tingkat kekayaan daerah.

$$\text{Tingkat kekayaan daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total pendapatan}}$$

c. Variabel Tingkat Ketergantungan Pada Pusat

Tingkat ketergantungan dengan pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan.

$$\text{tingkat ketergantungan dengan pusat} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total pendapatan}}$$

d. Variabel Temuan Audit BPK

Untuk mengetahui temuan audit suatu daerah dapat dilakukan dengan memberikan opini atas temuan audit, jika Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*) diberi skor 0 (nol), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberi skor 1 (satu), dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi skor 2 (dua).

D. Populasi dan Sampel

Menurut Burhan Bungin (2014:109) Populasi merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan temuan Audit BPK.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel. *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan memilih sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian (Sekaran 2011:136). Sampel dalam penelitian ini adalah Neraca untuk mendapatkan total aset, Laporan Realisasi anggaran untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)

total pendapatan daerah dan total Belanja daerah serta temuan audit BPK didapatkan dari ikhtisar pemeriksaan semester I dan II tahun 2008-2017 pada website Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu <http://www.bpk.go.id>.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mencari data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ke berbagai media yang menyajikan data tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Temuan audit 7 tahun terakhir.

2. Studi Kepustakaan

Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data dan informasi selain dari objek penelitian. Dengan studi kepustakaan, diharapkan peneliti dapat menemukan landasan teori untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Sumber studi kepustakaan adalah buku-buku, literatur-literatur dan penelitian terdahulu terkait kinerja pemerintah daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

F. Teknik Analisis data

1. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas

pengujian normalitas data dengan menggunakan P-P plot, jika data (titik-titik) menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal maka ini membuktikan bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Suatu model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah mempunyai nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih kecil dari 10 dan mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1.

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik *Scatterplot*. Model yang bebas dari heteroskedastisitas memiliki grafik *scatterplot* dengan pola titik yang menyebar di atas dan di bawah sumbu Y.

d. Uji Autokorelasi

Kriteria yang digunakan untuk menyatakan ada tidaknya autokorelasi dengan Uji *Durbin-Watson*, yaitu jika pengujian diperoleh nilai Durbin-Watson diantara -2 sampai dengan +2 , maka diindikasikan tidak ada autokorelasi.

2. Uji Analisis Regresi linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel bebas (variabel bebas lebih dari satu) terhadap variabel terikat. Sebelum melakukan analisis maka harus dilaksanakan uji prasyarat analisis regresi linear berganda yaitu uji normalitas, uji linearitas, dan uji asumsi klasik. Setelah melakukan uji prasyarat dan hasil uji prasyarat menunjukkan hal yang bagus maka selanjutnya melakukan analisis regresi. Adapun rumus regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

- α : Nilai konstanta
- Y : Kinerja pemerintah daerah
- X : Ukuran daerah, yang diukur dari total aset.
- X : Tingkat kekayaan daerah, yang dihitung dari Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan
- X : Tingkat ketergantungan dengan pusat, yang dihitung dari Dana Alokasi Umum dengan Total pendapatan
- X : Temuan audit, yang didapatkan dari iktisar pemeriksaan semester I dan II tahun 2008-2017.
- e : koefisien *error*

3. uji hipotesis

a. Uji Koefesien Determinasi (R²)

Hasil perhitungan R² secara keseluruhan digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model yang digunakan mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila nilai R² mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat dan sebaliknya, apabila R² mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variasi variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat.

b. Uji T

Uji t berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdapat didalam model secara terpisah (parsial) terhadap variabel terikat, caranya dengan membandingkan probabilitas (P Value) dengan taraf signifikan atau 0,05. Apabila dari hasil perhitungan dengan bantuan komputer SPSS diperoleh nilai probabilitas (P Value) $<0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel X (X_1, X_2, X_3 dan X_4) berpengaruh terhadap Y secara terpisah (parsial), sebaliknya apabila diperoleh nilai probabilitas (P Value) $>0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel X (X_1, X_2, X_3 dan X_4) tidak berpengaruh terhadap Y secara terpisah (parsial).

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Pemekaran ini turut menjadikan Kota Palopo selaku perintahan otonom kota Palopo. Luas wilayah Kabupaten Luwu 3.000,25 km², sebelum Kota Palopo menjadi kota otonom dengan jarak tempuh dari Kota Makassar lebih dari 367 km.

Pemekaran kabupaten Luwu yang kemudian melahirkan kabupaten Luwu Utara dan kota otonom Palopo di bawah kepemimpinan Bupati Luwu Dr. Kamrul Kasim yang menjabat Bupati Luwu dari tahun 1999 sampai tahun 2003.

Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari kota Palopo ke kota Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi ibu kota sejak 13 Februari 2006. Periode 2004-2009 Luwu dipimpin oleh Bupati H.M. Basmin Mattayang kemudian dilakukan pemilihan Kepala Daerah langsung pertama di daerah itu dan memilih Ir. H. Andi Mudzakkar sebagai bupati terpilih periode 2009-2018.

B. Visi dan Misi Pemerintah kabupaten Luwu

1. Visi:

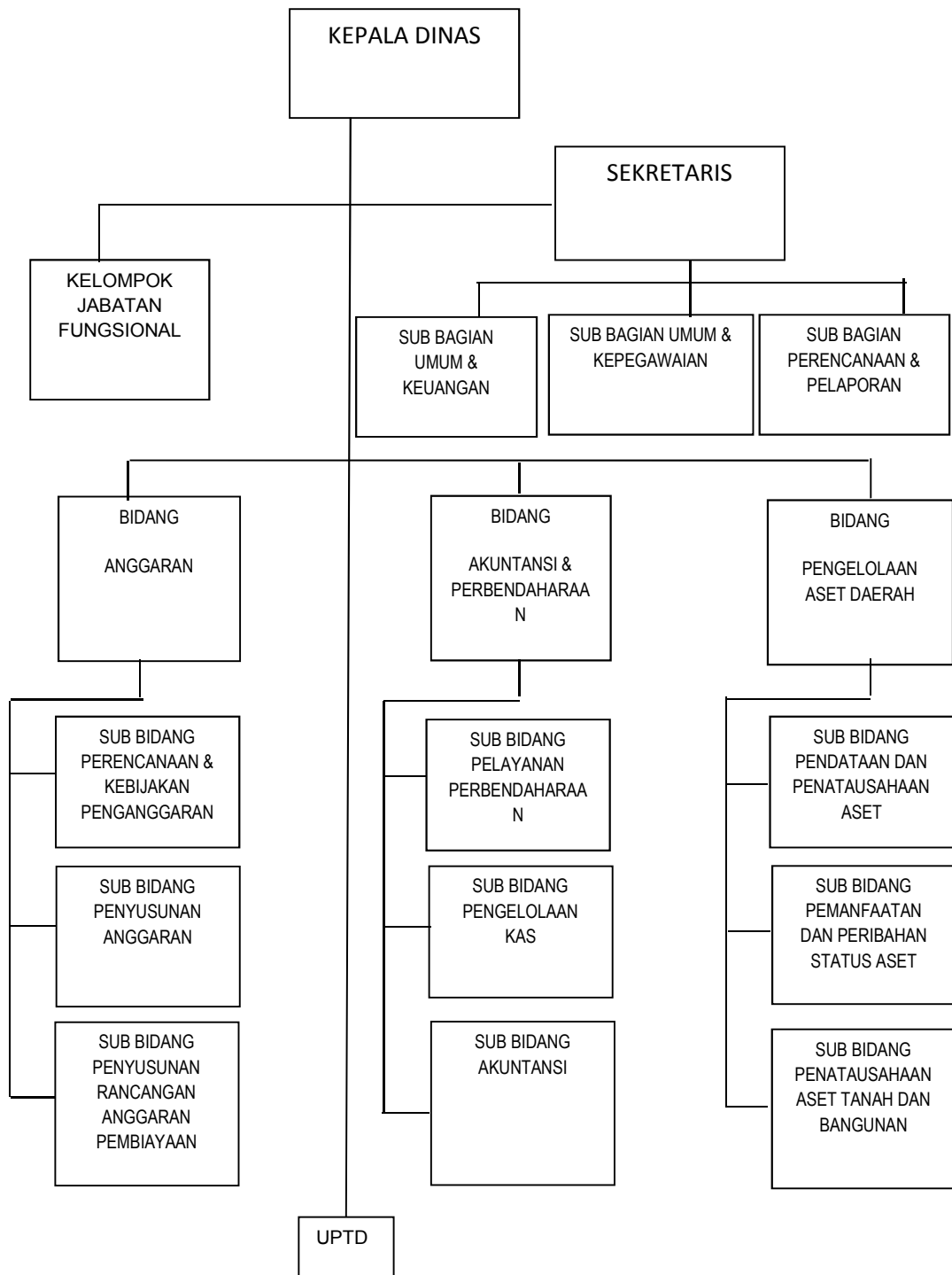
Terwujudnya Luwu yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing

2. Misi:

- a. Membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparansi dan demokratis didalam menjalankan tugas/fungsi yang profesional dan berakhlak mulia
- b. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui penguatan persaudaraan antar suku, etnis, agama dan budaya serta meningkatkan stabilitas keamanan dan penguatan ekonomi daerah melalui supremasi hukum berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang maha Esa.
- c. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan.
- d. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu, cepat, tepat, merata dan Akuntabel
- e. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui sistim pendidikan untuk semua dan berpihak pada yang lemah
- f. Meningkatkan sistem perencanaan pembanguana yang aspiratif, responsif, inovatif dan terpadu melalui peran aktif masyarakat secara berkelanjutan dalam pembangunan darah segala bidang
- g. Mengembangkan sistim informasi yang mutakhir sampai tingkat kecamatan untuk kepentingan pembangunan daerah

C. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor BPKD Kabupaten Luwu



D. Tugas dan Fungsi

1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan

- a. Penyusunan kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang

2) Sekretaris

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- c. Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;

- d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- e. Pengelolaan keuangan Badan;
- f. Pengelolaan situs web Badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh :

Sub Bagian Program dan Pelaporan;

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
2. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
3. Pengelolaan penyusunan anggaran Badan;
4. Pengelolaan situs web Badan dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
2. Pengelolaan barang/jasa Badan;
3. Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
4. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
5. Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penatausahaan keuangan Badan;
2. Penyusunan pelaporan keuangan Badan; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Bidang anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi perencanaan dan kebijakan penganggaran, penyusunan anggaran serta penyusunan rancangan anggaran pembiayaan. Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

1. perumusan bahan rancangan kemampuan keuangan terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;

2. perumusan bahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. perumusan bahan kebijakan bahan umum perubahan APBD Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP);
4. perumusan bahan surat edaran tentang pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKAP)-perangkat daerah (SKPD) dan RKA/RKAP- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
5. perumusan bahan nota keuangan APBD dan perubahan APBD;
6. perumusan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD dan PPKD;
7. perumusan bahan sosialisasi rancangan APBD dan Perubahan APBD;
8. perumusan bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
9. perumusan bahan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD;
10. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
11. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran mempunyai

tugas :

1. memproses bahan dan menyusun kemampuan keuangan terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
2. menyusun bahan kebijakan umum APBD dan kebijakan umum Perubahan APBD;
3. menyusun bahan PPAS dan PPASP;
4. menyusun surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA/ RKAP-SKPD dan RKA/RKAP-SKPD;
5. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
6. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

Sub Bidang Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas :

1. menyusun bahan sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan PAPBD;
2. menyusun bahan nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
3. menyusun bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
4. menyusun bahan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD;
5. menyusun bahan tanggapan hasil evaluasi rancangan APBD dan PAPBD;

6. memproses dan mengkoordinir penyusunan DPA/ DPPA-SKPD dan DPA/DPPA-PPKAD.
7. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
8. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

Sub Bidang Penyusunan Rancangan Anggaran Pembiayaan mempunyai tugas :

1. menyusun bahan-bahan dan materi kebijakan pembiayaan daerah;
2. merancang pembiayaan daerah;
3. menyusun bahan koordinasi dengan unit kerja dan perangkat daerah terkait guna kepentingan penyusunan perencanaan pembiayaan;
4. menyusun bahan kebijakan teknis anggaran pembiayaan daerah;
5. menyusun data dan menganalisa kemampuan keuangan daerah, kebijakan teknis penerimaan dan pengeluaran belanja daerah;
6. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
7. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

4) Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi pelayanan perbendaharaan, pengelolaan kas dan akuntansi. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan operasional pengelolaan keuangan;
2. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kas daerah;

3. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan kas;
4. pelaksanaan rekapitulasi dan evaluasi atas seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;
5. pelaksanaan pembinaan perbendaharaan dan pengelolaan administrasi keuangan;
6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan mempunyai tugas :

1. melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen data Surat Perintah Membayar (SPM) SKPD;
2. melakukan pengelolaan administrasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
3. memproses register penerbitan SP2D;
4. memproses register surat penolakan penerbitan SP2D;
5. melakukan pembinaan perbendaharaan dengan pengelola keuangan SKPD;
6. melakukan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran;
7. melakukan pembinaan kepada pengelola urusan gaji SKPD;
8. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
9. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.

Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai tugas :

1. melakukan pengendalian anggaran kas SKPD;
2. menyusun Surat Penyediaan Dana (SPD);

3. melakukan pembinaan dalam penatausahaan keuangan daerah kepada SKPD;
4. melakukan penerimaan, menyimpan dan membukukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
5. melakukan evaluasi data penerimaan dan pengeluaran daerah;
6. melakukan administrasi pengelolaan pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;
7. melakukan rekonsiliasi buku pembantu kas daerah dengan rekening koran bank dalam aplikasi;
8. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
9. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.

Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas :

1. melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan kepada seluruh SKPD;
2. melakukan pendokumentasian bukti transaksi;
3. melakukan evaluasi hasil jurnal transaksi yang telah dilakukan SKPD/ Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
4. melakukan inventarisir jurnal koreksi;
5. memproses bukti pendukung laporan keuangan;
6. memproses data hasil pemeriksaan pengawasan internal maupun eksternal;
7. menyusun bahan laporan prognosis;
8. menyusun laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan Pemerintah Daerah;

9. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
10. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.

5) Bidang Pengelolaan Aset

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi pendataan dan penatausahaan aset, pemanfaatan dan perubahan status aset serta penatausahaan aset tanah dan bangunan.

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai Fungsi :

1. pelaksanaan pendataan barang milik daerah;
2. pelaksanaan koordinasi barang milik daerah;
3. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
4. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
5. pelaksanaan inventarisir dan pelaporan tanah dan bangunan pada SKPD;
6. pelaksanaan dan koordinasi pemindahtanganan dan penghapusan tanah dan bangunan;
7. pelaksanaan koordinasi pembongkaran bangunan;
8. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
9. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Pendataan dan Penatausahaan Aset mempunyai tugas :

1. menyusun bahan koordinasi perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
2. menyusun bahan koordinasi hasil pengamanan barang milik daerah;

3. menyusun bahan koordinasi penggunaan barang milik daerah;
4. melakukan dan mengkoordinasikan penghapusan barang milik daerah;
5. melakukan dan mengkoordinasikan penatausahaan barang milik daerah;
6. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah;
7. menyusun bahan koordinasi pengelolaan barang milik daerah pada SKPD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
8. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
9. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset mempunyai tugas:

1. melakukan dan mengkoordinasikan pemanfaatan barang milik daerah;
2. melakukan dan mengkoordinasikan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
3. melakukan dan menyusun bahan koordinasi penilaian barang milik daerah;
4. melakukan dan menyusun bahan koordinasi pemindahtanganan barang milik daerah;
5. menyusun bahan koordinasi pemusnahan barang milik daerah;
6. menyusun bahan koordinasi pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara;

7. melakukan dan mengkoordinasikan tuntutan ganti rugi atas barang milik daerah;
8. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
9. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

Sub Bidang Penatausahaan Aset Tanah dan Bangunan mempunyai tugas :

1. melakukan dan menyusun bahan koordinasi penatausahaan meliputi pembukuan inventarisasi dan pelaporan tanah dan bangunan pada SKPD;
2. melakukan penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan tanah dan bangunan di luar tanah dan bangunan yang dikelola SKPD;
3. menyusun bahan koordinasi penanganan legalisasi dengan kantor pertanahan;
4. melakukan dan menyusun bahan koordinasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dan bangunan;

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Objek penelitiannya adalah pemerintah Kabupaten Luwu untuk periode 2008-2017. Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data dari Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran dan iktisar pemeriksaan BPK.

1. Karakteristik Pemerintah Daerah

a. Variabel Ukuran Daerah

Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan dibidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja. Ukuran daerah dalam penelitian ini dapat diukur dengan melihat total aset pemerintah daerah. Hasil analisis total aset dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Analisis Total Aset Tahun 2008-2017

Tahun	Total Aset	Perkembangan	
		Nominal	%
2008	886.201.204.959		
2009	1.020.852.999.484	134.651.794.525	15,19
2010	1.117.724.118.490	96.871.119.006	9,49
2011	1.287.388.087.676	169.663.969.186	15,18
2012	1.417.752.332.187	130.364.244.511	10,13
2013	1.436.806.297.386	19.053.965.199	1,34
2014	1.288.379.840.946	-148.426.456.440	-10,33
2015	1.569.226.881.530	280.847.040.584	21,79
2016	2.049.738.439.506	480.511.557.976	30,62
2017	2.102.519.707.789	52.781.268.283	2,58

Dari data yang diperoleh pada tabel diatas sebanyak 10 sampel yang menunjukkan realisasi total aset pertahunnya seperti yang kita lihat bahwa persentase kenaikan total aset yang sangat mencolok yaitu pada tahun 2015 ketahun 2016 sebesar 30,62% dengan nilai dari Rp. 1.569.226.881.530 naik menjadi Rp 2.049.738.439.506. Begitu pula pada tahun 2014 ketahun 2015 kenaikan total aset juga terjadi sebesar 20,79% dari nilai Rp. 1.288.379.840.946 menjadi Rp. 1.569.226.881.530. sedangkan pada tahun lainnya kenaikan hanya berkisar 2% sampai 4%. Hanya saja pada tahun 2013 ketahun 2014 total aset pemerintah Kabupaten Luwu mengalami penurunan sebesar -10,33%.

Adapun rumus untuk mengetahui ukuran daerah pada kantor Bupati Kabupaten Luwu yaitu:

$$\text{Ukuran Daerah} = \ln \text{ Total Aset}$$

Berdasarkan Hasil perhitungan ukuran daerah diatas, maka ukuran daerah (Aset Daerah) pada Kantor Bupati Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel dibawah.

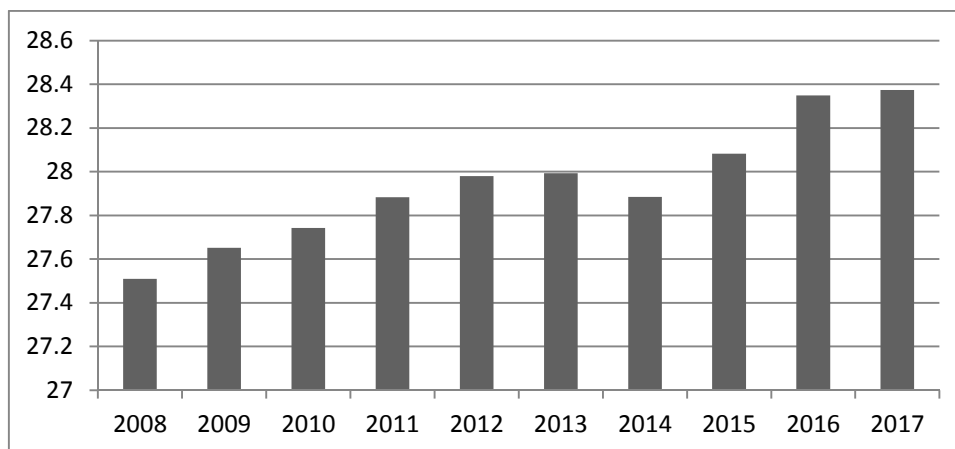
Tabel 5.2
Hasil Ukuran Daerah

Tahun	Total Aset	Ln Total Aset
2008	886.201.204.959	27,51020986
2009	1.020.852.999.484	27,65165967
2010	1.117.724.118.490	27,7423157
2011	1.287.388.087.676	27,88363654
2012	1.417.752.332.187	27,98009387
2013	1.436.806.297.386	27,99344392
2014	1.288.379.840.946	27,88440661
2015	1.569.226.881.530	28,08160418
2016	2.049.738.439.506	28,34873331
2017	2.102.519.707.789	28,3741576

Untuk melihat lebih jelas dapat disajikan pada grafik berikut:

Grafik 5.1

Ukuran Daerah



Grafik diatas menggambarkan adanya penurunan pada tahun 2013 ketahun 2014 selain daripada itu ditahun lain mengalami peningkatan.

b. Variabel Tingkat Kekayaan Daerah

Adapun pertimbangan tingkat kekayaan diukur dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah karena merupakan satu-satunya sumber

keuangan yang berasal dari pengelolaan sumber daya pada daerah tersebut. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah.

1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil analisis realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel 5.3

Tabel 5.3
Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2017

Tahun	PAD	PERKEMBANGAN	
		Nominal	%
2008	17.604.315.578		
2009	19.337.923.976	1.733.608.398	9,85
2010	17.930.679.544	-1.407.244.432	-7,28
2011	18.318.366.436	387.686.892	2,16
2012	29.322.233.932	11.003.867.496	60,07
2013	33.588.452.686	4.266.218.754	14,55
2014	63.945.274.905	30.356.822.219	90,38
2015	78.558.298.846	14.613.023.941	22,85
2016	95.564.293.748	17.005.994.902	21,65
2017	109.239.658.472	13.675.364.724	14,31

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis realisasi PAD menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2009 ketahun 2010 sebesar Rp. 1.407.244.432. selain dari penurunan tersebut, kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2013 ketahun 2014 yaitu 90,37% sebesar Rp. 30.356.822.219. tak hanya ditahun tersebut kenaikan juga terjadi pada tahun 2011 ketahun 2012 yaitu 60,07% sebesar Rp. 11.003.867.496.

2) Total Pendapatan

Analisis total pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu periode 2008 sampai 2017 diharapkan mampu menggambarkan apakah mengalami pertumbuhan secara positif atau justru negatif.

Tabel 5.4
Analisis Total Pendapatan

Tahun	Total Pendapatan	PERKEMBANGAN	
		Nominal	%
2008	452.978.538.959		
2009	471.223.032.757	18.244.493.798	4,03
2010	550.117.010.536	78.893.977.779	16,74
2011	673.528.704.782	123.411.694.246	22,43
2012	687.459.489.347	13.930.784.565	2,07
2013	780.140.631.491	92.681.142.144	13,48
2014	938.957.904.123	158.817.272.632	20,36
2015	1.019.011.553.019	80.053.648.896	8,53
2016	1.276.603.640.294	257.592.087.275	25,28
2017	1.046.912.373.951	-229.691.266.343	-17,99

Melihat dari total pendapatan Pemerintah Kabupaten Luwu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, namun peningkatan yang sangat mencolok terjadi pada tahun 2010 ketahun 2011 sebesar 22,43 % senilai Rp. 123.411.694.246. selain daripada itu pada tahun 2015 ketahun 2016 juga mengalami peningkatan yang sebesar 25,28% senilai Rp. 257.592.087,275. Namun pada tahun selanjutnya yaitu 2016 ketahun 2017 mengalami penurunan sebesar 17,99% senilai Rp. 229.691.266.343.

Adapun rumus untuk menghitung Tingkat Kekayaan Daerah pada kantor Bupati Kabupaten Luwu yaitu:

$$\text{Tingkat Kekayaan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

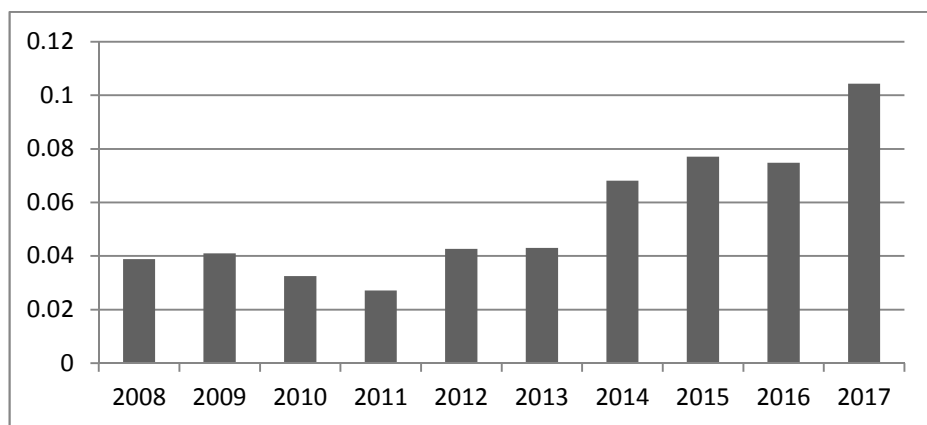
Berdasarkan rumus diatas, maka tingkat kekayaan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.5
Tingkat Kekayaan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Tingkat Kekayaan Daerah
2008	17.604.315.578	452.978.538.959	0,038863465
2009	19.337.923.976	471.223.032.757	0,041037731
2010	17.930.679.544	550.117.010.536	0,032594301
2011	18.318.366.436	673.528.704.782	0,027197603
2012	29.322.233.932	687.459.489.347	0,042653035
2013	33.588.452.686	780.140.631.491	0,043054356
2014	63.945.274.905	938.957.904.123	0,068102387
2015	78.558.298.846	1.019.011.553.019	0,077092648
2016	95.564.293.748	1.276.603.640.294	0,074858234
2017	109.239.658.472	1.046.912.373.951	0,104344605

Melihat tabel diatas, tingkat kekayaan daerah mengalami fluktuasi berdasarkan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan. Untuk melihat secara jelas disajikan grafik berikut ini

Grafik 5.2
Tingkat Kekayaan Daerah



c. Variabel Tingkat Ketergantungan Pada Pusat

Tingkat ketergantungan pada pusat yang dinyatakan dalam besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Hasil analisis realisasi DAU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6
Analisis Realisasi Dana Alokasi Umum periode 2008-2017

Tahun	DAU	PERKEMBANGAN	
		Nominal	%
2008	318.300.451.000		
2009	338.393.478.000	20.093.027.000	6,31
2010	366.703.274.200	28.309.796.200	8,37
2011	396.747.997.000	30.044.722.800	8,19
2012	475.295.053.000	78.547.056.000	19,79
2013	542.118.008.000	66.822.955.000	14,06
2014	595.699.150.000	53.581.142.000	9,88
2015	624.131.623.000	28.432.473.000	4,77
2016	689.096.791.000	64.965.168.000	10,4
2017	676.996.576.000	-12.100.215.000	-1,76

Dari data yang diperoleh ditabel 5.5 menunjukkan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pertahunnya. Seperti yang kita lihat bahwa kenaikan DAU yang mencolok terjadi pada tahun 2011 ketahun 2012 sebesar 19,79% senilai Rp. 78.547.056.000. sedangkan pada tahun lainnya kenaikan DAU hanya berkisar 1% sampai 3%. Namun pada tahun 2016 ketahun 2017 DAU mengalami penurunan sebesar Rp. 12.100.215.000.

Tingkat ketergantungan pada pusat dapat dihitung berdasarkan rumus berikut ini.

$$\text{Tingkat Ketergantungan Pada Pusat} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total Pendapatan}}$$

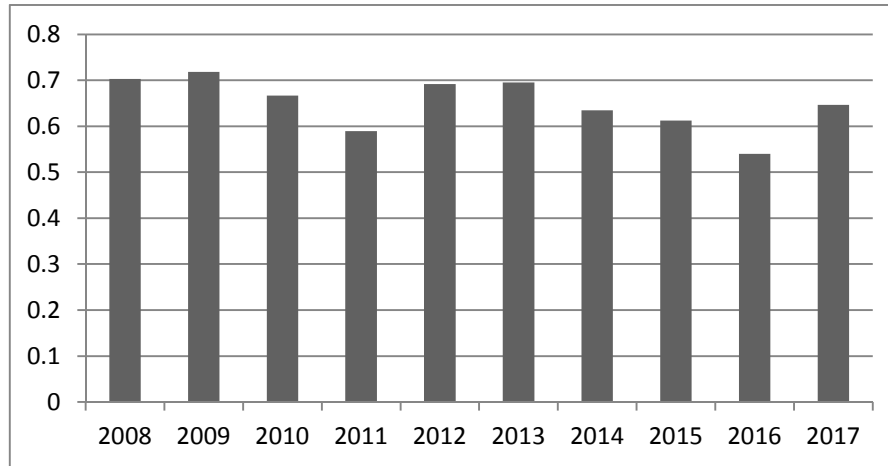
Berdasarkan rumus diatas, tingkat ketergantungan pada pusat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.7
Tingkat Ketergantungan Pada Pusat

Tahun	Dana Alokasi Umum	Total Realisasi pendapatan	Tingkat Ketergantungan Pada Pusat
2008	318.300.451.000	452.978.538.959	0,702683292
2009	338.393.478.000	471.223.032.757	0,71811744
2010	366.703.274.200	550.117.010.536	0,666591411
2011	396.747.997.000	673.528.704.782	0,58905878
2012	475.295.053.000	687.459.489.347	0,691378998
2013	542.118.008.000	780.140.631.491	0,694897799
2014	595.699.150.000	938.957.904.123	0,634425832
2015	624.131.623.000	1.019.011.553.019	0,612487288
2016	689.096.791.000	1.276.603.640.294	0,539789148
2017	676.996.576.000	1.046.912.373.951	0,64666021

Dari tabel diatas tingkat ketergantungan pada pusat berdasarkan Dana Alokasi Umum terhadap Total pendapatan juga mengalami fluktuasi. Untuk melihat secara jelas disajikan grafik berikut ini.

Grafik 5.3
Tingkat Ketergantungan Pada Pusat



Grafik menggambarkan adanya fluktuasi dari tahun ke tahun.

d. Variabel Temuan Audit

Temuan audit suatu daerah dapat dilakukan dengan memberikan opini atas temuan audit, jika Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*) diberi skor 1 (satu), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberi skor 1 (satu), dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi skor 0 (dua). Berikut ini adalah hasil temuan audit BPK didapatkan dari ikhtisar pemeriksaan semester I dan II tahun 2008-2017 pada website Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu <http://www.bpk.go.id>.

Tabel 5.8
Data Temuan Audit

Tahun	Opini Audit	Skor
2008	WDP	1
2009	WDP	1
2010	WDP	1
2011	WDP	1
2012	TMP	1
2013	WDP	1
2014	WDP	1
2015	WTP	0
2016	WTP	0
2017	WDP	1

Dari tabel yang disajikan diatas berdasarkan iktisar pemeriksaan Badan Pengelola Keuangan (BPK) bahwa pada tahun 2008 sampai 2014 dan 2017 terdapat opini audit Kabupaten Luwu yaitu Tidak Memberikan Pendapat dan Wajar Dengan Pengecualian maka diberi skor 1 (satu), tahun 2015 dan 2016 tidak ada opini audit maka diberi skor 0 sesuai dengan proksi temuan audit dalam penelitian ini.

B. Kinerja Pemerintah Daerah

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah. Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi, dan misi suatu organisasi. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dai input atau realisasi pengeluaran dengan alokasi yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Semakin kecil rasio, maka semakin baik tingkat efisiensinya, begitu pula sebaliknya. Semakin besar rasio, maka akan semakin buruk tingkat efisiensinya. Berikut ini rumus untuk mendapatkan kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus efisiensi diatas kinerja pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.9
Kinerja Pemerintah Daerah

Tahun	Total Realisasi Belanja	Total Realisasi pendapatan	KPD
2008	455.458.661.044	452.978.538.959	1,005475143
2009	463.240.183.542	471.223.032.757	0,983059297
2010	538.923.160.739	550.117.010.536	0,979651875
2011	669.748.417.294	673.528.704.782	0,99438734
2012	657.160.307.214	687.459.489.347	0,955925865
2013	787.573.915.218	780.140.631.491	1,009528133
2014	32.473.810.285	938.957.904.123	0,034584948
2015	126.214.484.403	1.019.011.553.019	0,123859719
2016	204.484.725.958	1.276.603.640.294	0,160178711
2017	236.576.200.208	1.046.912.373.951	0,225975169

Tabel kinerja yang disajikan diatas dapat kita ketahui berdasarkan kriteria efisiensi kinerja pemerintah daerah yang disajikan pada tabel 3.1 bahwa Semakin kecil rasio, maka semakin baik tingkat efisiensinya, begitu pula sebaliknya. Semakin besar rasio, maka akan semakin buruk tingkat efisiensinya. Maka pada tahun 2014 sampai 2017 persentase kinerja dibawah 60% dikategorikan kinerja "sangat efisien". Sedangkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2008 sampai 2013 efisiensi kinerja 90% - 100% termasuk kriteria "kurang efisien".

C. Hasil Uji Asumsi Klasik

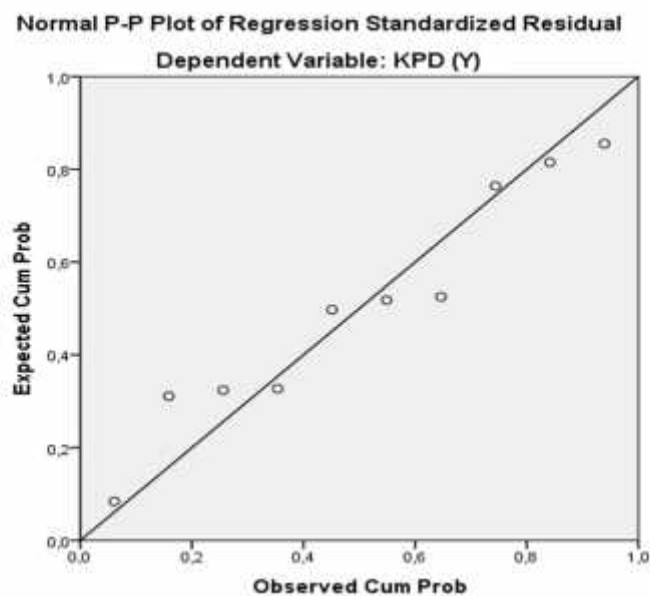
1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Analisis data mensyaratkan data berdistribusi normal untuk menghindari bias dalam analisis data.

Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara kasat mata dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan hasil statistik, grafik PP Plot menunjukkan bahwa data (titik-titik) menyebar disekitar garis diagonal dan penyeberannya mengikuti arah garis diagonal tersebut. Hal ini membuktikan bahwa data terdistribusi dengan normal sehingga model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas

Gambar 5.1
Hasil Uji Normalitas Data



2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah didalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas.

Suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1. Pada output bagian ini, terlihat bahwa dari masing-masing variabel independen dengan nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi ini bahwa uji multikolinearitas terpenuhi.

Tabel 5.10
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-20,238	12,146		-1,666	,157		
UD	,697	,420	,437	1,662	,157	,274	3,644
TKD	-17,879	4,079	-1,000	-4,383	,007	,365	2,740
TKPP	3,574	1,719	,458	2,080	,092	,392	2,553
TA	,070	,206	,066	,337	,749	,492	2,033

a. Dependent Variable: KPD

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan lain pada regresi.

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson Test*, berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai statistik *Durbin Watson* yaitu 1,268 berada pada kisaran -2 sampai +2,

oleh karena itu diputuskan bahwa model ini terbebas dari adanya autokorelasi.

Tabel 5.11
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,951 ^a	,905	,829	,18298	1,268

a. Predictors: (Constant), TA, TKD, TKPP, UD

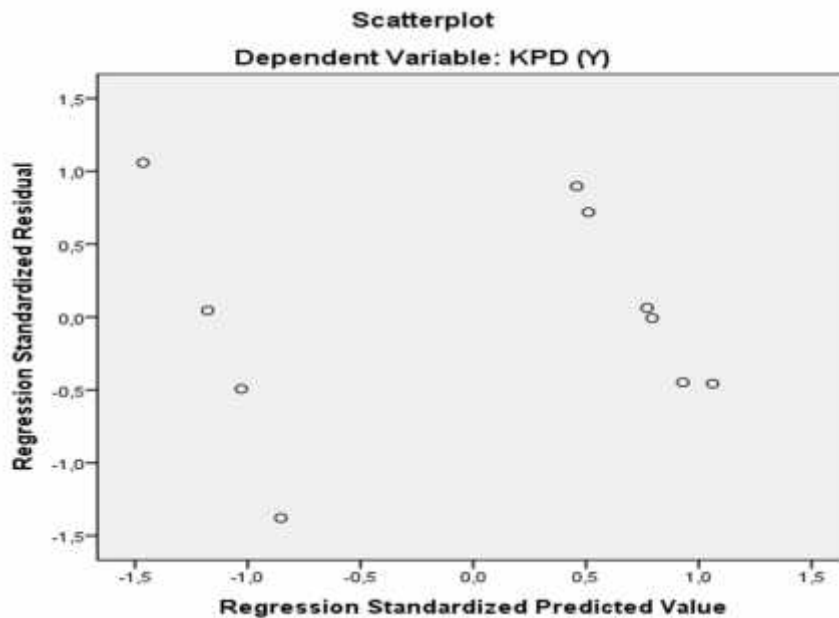
b. Dependent Variable: KPD

4. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik *Scatterplot*. Model yang bebas dari heteroskedastisitas memiliki titik yang menyebar diatas dan dibawah sumbu Y.

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan grafik *Scatterplot* yang disajikan pada gambar dibawah menunjukkan data menyebar secara acak di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Gambar 5.2
 Hasil Uji Heteroskedastisitas



D. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

Tabel 5.12
 Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,595	4	,399	11,911	,009 ^b
	Residual	,167	5	,033		
	Total	1,763	9			

a. Dependent Variable: KPD

b. Predictors: (Constant), TA, TKD, TKPP, UD

Dari hasil pengujian kelayakan model regresi yang telah disajikan pada tabel ANOVA di atas, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 11,911 dengan nilai signifikan sebesar 0,009. Karena nilai yang diperoleh yaitu

0,009 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk layak atau baik untuk dijadikan sebagai alat estimasi dan dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Persamaan regresi digunakan untuk menjawab hipotesis 1,2,3 dan 4 serta untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan efisiensi kinerja.

2. Hasil Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dilakukan dengan menggunakan metode enter dimana semua variabel dimasukan untuk mencari pengaruh variabel independen dan variabel dependen melalui meregresikan kinerja pemerintah daerah sebagai variabel dependen dan ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat dan temuan audit sebagai variabel independen. Hasil analisis regresi linear berganda ini menggunakan program SPSS yang sudah tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.13
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-20,238	12,146		-1,666	,157
Ukuran Daerah	,697	,420	,437	1,662	,157
Tingkat Kekayaan Daerah	-17,879	4,079	-1,000	-4,383	,007
Tingkat Ketergantungan Pada Pusat	3,574	1,719	,458	2,080	,092
Temuan Audit	,070	,206	,066	,337	,749

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil dari pengelolaan data pada tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut:

$$KPD = -20,238 + 0,697 UD - 17,879 TKD + 3,574 TKPP + 0,070 TA + e$$

Model persamaan regresi linear berganda diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar -20,238 menunjukkan jika variabel ukuran daerah (X1), tingkat kekayaan daerah (X2), tingkat ketergantungan pada pusat (X3) dan temuan audit (X4) bernilai konstan maka variabel kinerja pemerintah daerah (Y) memiliki nilai negatif sebesar 20,238 satuan.
- b. Ukuran daerah (X1) memiliki koefisien positif sebesar 0,697. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan ukuran daerah sebesar 1 satuan, maka kinerja pemerintah daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,697 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
- c. Variabel tingkat kekayaan daerah memiliki koefisien negatif sebesar -17,879. Itu artinya bahwa jika tingkat kekayaan daerah naik 1 satuan maka kinerja pemerintah daerah akan turun sebesar 17,879 dengan asumsi variabel lain konstan.
- d. Variabel tingkat ketergantungan pada pusat memiliki nilai koefisien positif sebesar 3,574. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan tingkat ketergantungan pada pusat sebesar 1 satuan, maka kinerja pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 3,574 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

- e. Variabel temuan audit memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,070. Hal ini juga menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan temuan audit sebesar 1 satuan maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,070 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

3. Uji Koefisien Determinasi

Hasil perhitungan R^2 secara keseluruhan digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model yang digunakan mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila nilai R^2 mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat dan sebaliknya, apabila R^2 mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variasi variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat.

Tabel 5.14

Hasil Uji R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,951 ^a	,905	,829	,18298	1,268

a. Predictors: (Constant), TA, TKD, TKPP, UD

b. Dependent Variable: KPD

Dari tabel yang disajikan di atas, diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,829. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai variabel kinerja pemerintah daerah (Y) berdasarkan rasio efisiensi kinerja dapat dijelaskan oleh variabel ukuran daerah (X1), tingkat kekayaan daerah (X2), tingkat ketergantungan pada pusat (X3) dan temuan audit (X4)

sebesar 82,9 persen. Dan sisanya yaitu 17,1 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

4. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji T)

Uji ini mengetahui dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $\alpha < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu.

Sebaliknya jika signifikansi $\alpha > 0,05$, maka tidak terjadi pengaruh yang signifikan. Berikut hasil uji regresi (Uji T) dicantumkan pada tabel 5.8 yang telah dibahas pada uji analisis regresi berganda:

- a. Variabel Ukura Daerah (X1) menunjukkan *coefficients Beta* sebesar 0,437 pada tingkat signifikansi 0,157, karena tingkat $0,157 > 0,05$ berarti bahwa variabel ukuran daerah (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian H1 dalam penelitian ini di tolak.
- b. Variabel tingkat kekayaan daerah (X2) menunjukkan *coefficients Beta* -1.000 pada tingkat signifikan 0,007. Karena tingkat signifikansi $0,007 < 0,05$, maka terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan variabel tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Luwu. Ini berarti bahwa semakin rendah tingkat kekayaan daerah maka semakin tinggi kinerja pemerintah. Begitupun sebaliknya, dengan demikian H2 dalam penelitian ini ditolak.
- c. Variabel tingkat ketergantungan pada pusat (X3) menunjukkan *coefficients Beta* 3,574 dengan tingkat signifikansi 0,092. Karena tingkat signifikansi $0,092 > 0,05$ maka hasil ini menunjukkan bahwa

tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Dengan demikian H3 dalam penelitian ini ditolak.

- d. Variabel temuan audit (X3) menunjukkan *coefficients Beta* 0,066 pada tingkat signifikansi 0,749. Karena tingkat signifikansi 0,749 > 0,05 maka hasil ini menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan ini H4 diterima.

E. Pembahasan

- a. Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu

Hasil temuan pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas variabel ukuran daerah terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. ini dapat diartikan bahwa perubahan peningkatan maupun penurunan ukuran suatu daerah yang dalam penelitian ini diprosikan dengan total aset tidak mempengaruhi kinerja pemerintah Kabupaten Luwu. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemda Kabupaten Luwu belum dapat berfungsi dengan baik. Pemerintah daerah yang berukuran besar dengan ditandai oleh besarnya jumlah aset daerah, seharusnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingginya ukuran daerah yang dilihat dari jumlah total aset daerah belum bisa menjamin tingginya kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut. Namun hasil penelitian mendukung penelitian dari Rustianingsih (2014) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

b. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu

Hasil temuan kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negative dan signifikan atas variabel ukuran daerah terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. ini dapat diartikan berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah kabupaten luwu yang tingkat kekayaan daerahnya yang rendah, maka kinerja pemerintah daerahnya tinggi, dan semakin besar tingkat kekayaan daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Luwu tidak mandiri dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya dan mencukupi kebutuhannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang berhasil membuktikan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tingkat signifikan 5%. Penelitian ini juga mendukung penelitian Sudarsana, yang menemukan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun hasil

penelitian ini tidak mendukung penelitian Sumarjo (2010), Mafiana dan Lulus (2013).

c. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Hasil temuan ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel Tingkat Ketergantungan Pada Pusat secara individu tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja. Sehingga dalam penelitian ini, H3 di tolak.

Hasil penelitian ini mengartikan bahwa perubahan peningkatan maupun penurunan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang diprosikan dengan total Dana Alokasi Umum dibandingkan dengan total pendapatan tidak akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Hubungan yang tidak berpengaruh dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Hal tersebut berakibat pada DAU belum dapat digunakan dengan baik oleh pemerintah daerah kabupaten Luwu.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Harumiati dan payamta (2014) yang menemukan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

d. Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu

Hasil temuan ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel temuan audit tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga dalam penelitian ini H4 diterima. Jadi terbukti bahwa semakin banyak nilai temuan audit yang diprosikan

dengan opini audit maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah, dan sebaliknya semakin kecil nilai temuan audit maka semakin besar kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yaitu variabel temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Artinya semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah tersebut.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja pada Kabupaten Luwu. Berdasarkan uraian dari pembahasan dalam penelitian ini, diperoleh simpulan bahwa:

- 1) Variabel ukuran daerah dengan proksi total aset menunjukkan *coefficients Beta* sebesar 0,047 pada tingkat signifikansi 0,157, karena tingkat 0,157 > 0,05 berarti bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengidentifikasikan bahwa peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Luwu belum dapat berfungsi dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingginya ukuran daerah yang dilihat dari jumlah total aset daerah belum bisa menjamin tingginya kinerja pemerintah daerah.
- 2) Variabel tingkat kekayaan daerah dengan proksi PAD dibanding total pendapatan yang menunjukkan *coefficients Beta* -1000 pada tingkat signifikansi 0,007, karena 0,007 < 0,05 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Ini dapat diartikan berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah Kabupaten Luwu yang tingkat kekayaan daerahnya yang rendah, maka kinerja pemerintah daerahnya tinggi, dan semakin besar tingkat kekayaan daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa

pemerintah kabupaten Luwu tidak mandiri dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya dan mencukupi kebutuhannya.

- 3) Variabel tingkat ketergantungan pada pusat dengan proksi DAU dibanding total pendapatan menunjukkan *coefficients Beta* 3,574 dengan tingkat signifikan 0,092, karena tingkat signifikan $0,092 > 0,05$ menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah Kabupaten Luwu, hal ini berakibat pada Dana lokasi Umum belum dapat digunakan dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu.
- 4) Temuan audit yang didapatkan dari pemeriksaan iktisar semester I dan II menunjukkan nilai *coefficients Beta* pada tingkat signifikansi $0,749 > 0,05$ maka terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Jadi terbukti bahwa semakin banyak temuan audit yang diprosikan dengan opini audit maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah Kabupaten Luwu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran bagi peneliti selanjutnya antara lain:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang dengan menambahkan proksi lain.
- 2) penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan variabel yang bersifat non keuangan seperti jumlah penduduk dan jumlah pegawai sehingga hasil penelitian lebih representatif.

- 3) Penelitian ini hanya menguji pada pemerintah daerah. Oleh karena itu penelitian berikutnya dapat menggunakan data pemda pada tingkat provinsi,
- 4) variabel temuan audit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan opini atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel temuan audit berupa jumlah kasus atau tindak lanjut hasil temuan audit BPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin Burhan, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edisi Kedua: Jakarta. Penerbit Kencana
- Halim, A dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta
- Hilmi, Amiruddin. Z (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi 2006-2009. Skripsi, Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Depok
- Harumiati, Y dan Payamta. 2014. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2011". *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol 3. No. 2
- Julitawati, E (2012) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh". *Jurnal akuntansi*
- Kusumawardani, media. 2012. *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif Lverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Accounting Analysis Journal 1*. Universitas Negri Semarang.
- Kusuma, R.A. 2017. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol 6. No 1
- Mustikarini, W.A., dan Fitriasaki, D. 2012. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007". *Simposium Nasional Akuntansi Xv*, Banjarnasin.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugroho, Fajar. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah*. FEB UNDIP. Semarang.
- Nordiawan, D. Dan A. Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta

- Pramono, 2008. *Klasifikasi Belanja Daerah*. Kursus Keuangan Daerah (KKD)
- Priatno, Duwi. (2008) *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Rachmawati, D. E. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi*, Edisi Kesepuluh. PT Indeks, Jakarta.
- Rustianingsih, S. 2014. Faktor faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2010, *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wenny, C. D (2012) *“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan”*. Jurnal ilmiah STIE MD

L
A
M
P
I
R
A
N

Tahun	UD(X1)	TKD(X2)	TKPP(X3)	TA(X4)	KPD (Y)
2008	27,51020986	0,038863465	0,702683292	1	1,005475143
2009	27,65165967	0,041037731	0,71811744	1	0,983059297
2010	27,7423157	0,032594301	0,666591411	1	0,979651875
2011	27,88363654	0,027197603	0,58905878	1	0,99438734
2012	27,98009387	0,042653035	0,691378998	1	0,955925865
2013	27,99314392	0,043054356	0,694897799	1	1,009528133
2014	27,88440661	0,068102387	0,634425832	1	0,034584948
2015	28,08160418	0,077092648	0,612487288	0	0,123859719
2016	28,34873331	0,074858234	0,539789148	0	0,160178711
2017	28,3741576	0,104344605	0,64666021	1	0,225975169

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	TA, TKD, TKPP, UD ^b		Enter

a. Dependent Variable: KPD

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,951 ^a	,905	,829	,18298	1,268

a. Predictors: (Constant), TA, TKD, TKPP, UD

b. Dependent Variable: KPD

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,595	4	,399	11,911	,009 ^b
	Residual	,167	5	,033		
	Total	1,763	9			

a. Dependent Variable: KPD

b. Predictors: (Constant), TA, TKD, TKPP, UD

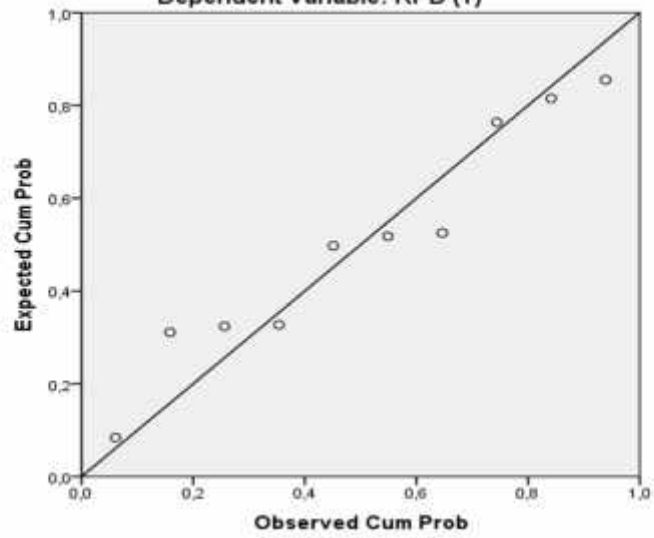
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-20,238	12,146		-1,666	,157		
	UD	,697	,420	,437	1,662	,157	,274	3,644
	TKD	-17,879	4,079	-1,000	-4,383	,007	,365	2,740
	TKPP	3,574	1,719	,458	2,080	,092	,392	2,553
	TA	,070	,206	,066	,337	,749	,492	2,033

a. Dependent Variable: KPD

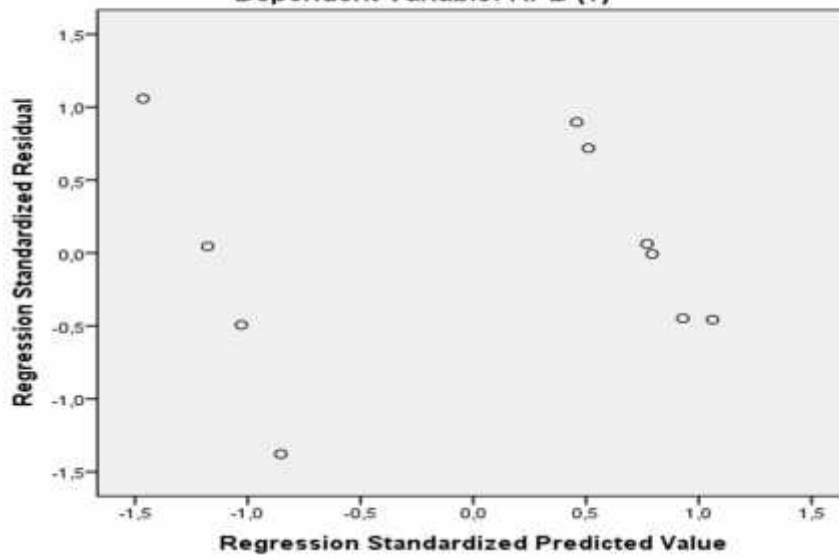
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: KPD (Y)



Scatterplot

Dependent Variable: KPD (Y)



RIWAYAT HIDUP



HUSNUL HATIMAH panggilan Husnul lahir di Parigusi, 20 November 1996, anak kedua dari 6 bersaudara yang merupakan buah cinta dan kasih sayang dari pasangan Sabri dan Masita. Penulis memulai pendidikan formal SDN 362 Parigusi kecamatan Latimojong kabupaten Luwu pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 BAJO Kec. Bajo kab. Luwu dan tammat pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bajo kecamatan bajo Kabupaten Luwu, Hingga akhirnya tammat pada tahun 2014. Dan pada tahun 2014 pulalah penulis terdaftar pada program studi Akuntansi, fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar program Strata 1(S1).

Atas ridho Allah SWT,dan dengan kerja keras, pengorbanan serta kesabaran pada tahun 2018 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi ***“Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah dan temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu”***